

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN BATANGMASUMAI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

Oleh

Muhammad Gorbi<sup>1</sup>,  
Etin Indrayani<sup>2</sup>, Udaya Madjid<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin

Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
gorbie21@yahoo.com

<sup>2, 3)</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri

---

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF FOSTERING VILLAGE GOVERNMENT FINANCIAL ADMINISTRATION IN DISTRICTS BATANGMASUMAI MERANGIN REGENCY JAMBI PROVINCE**

*The implementation of village government with a very large budget allocation, of course, orderly financial administration is very necessary in the context of accountability and transparency in development, but in Batangmasumai District, Merangin Regency, there are still villages that experience financial administration findings and delays in the preparation of the APBDes. Therefore, it is considered important to conduct research related to the implementation of policies on financial administration development in Batangmasumai sub-district, which based on district regulations has the authority in the development.*

*This study uses the theory of policy implementation according to Edward III and SWOT analysis and uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques through interviews and documentation.*

*The results of the discussion of this study are that policy implementation is seen from indicators 1) communication has been carried out through direct coaching to the village and at the sub-district office clearly and consistently, but the many regulations and changing regulations make it difficult for village officials to study them, 2) Resources, staff resources are lacking and even then there is only one honorary staff, judging from the facilities are sufficient, as well as information is also available and the authority is also owned by the sub-district, 3) Disposition, judging from the appointment of bureaucrats is still not in accordance with existing needs even in the job map not available and judging from the incentives it is also still not evenly distributed for temporary employees, 4) Organizational structure seen from the SOP also does not exist even the technical perbup of coaching also does not exist and judging from the fragmentation there is also not seen from the job map there are no staff positions related to coaching. Then there are six internal factors and four external factors and there are four very strategic issues, two are quite strategic and one is operational. The researcher's suggestion is that the sub-district needs to increase firmness and coordination and propose the making of a technical regulation for guidance.*

**Keywords:** implementation policy, finance, village

## ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan desa dengan alokasi anggaran yang sangat besar, tentunya tertib administrasi keuangan sangatlah perlu dalam rangka akuntabilitas dan transparansi dalam pembangunan, namun di Kecamatan Batangmasumai Kabupaten Merangin masih terdapat desa yang mengalami temuan administrasi keuangan dan keterlambatan dalam penyusunan APBDes. Oleh karena itu dinilai penting untuk dilakukan penelitian terkait implementasi kebijakan pembinaan administrasi keuangan di Kecamatan Batangmasumai, yang mana berdasarkan peraturan kecamatan memiliki kewenangan dalam pembinaan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III dan analisis SWOT serta menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil pembahasan penelitian ini bahwa implementasi kebijakan dilihat dari indikator 1) komunikasi telah dilaksanakan melalui pembinaan langsung ke desa maupun di kantor camat dengan jelas dan konsisten, namun banyaknya peraturan dan berubah ubahnya peraturan merepotkan perangkat desa dalam memperlajarnya, 2) Sumberdaya, sumber daya staf mengalami kekurangan dan itupun hanya da staf honorer satu orang saja, dilihat dari fasilitas sudah mencukupi, begitu juga informasi juga sudah tersedia dan wewenang pun juga sudah dimiliki kecamatan, 3) Disposisi, dilihat dari pengangkatan Birokrat masih belum sesuai dengan kebutuhan yang ada bahkan dalam peta jabatan pun tidak tersedia dan dilihat dari insentif juga masih belum merata untuk pegawai honorer, 4) Struktur organisasi dilihat dari SOP juga belum ada bahkan perbup teknis pembinaan juga belum ada dan dilihat dari fragmentasi juga belum ada dilihat dari peta jabatan belum ada jabatan staf terkait pembinaan. Kemudian terdapat enam faktor internal dan empat faktor eksternal serta terdapat empat isu sangat strategis, dua cukup strategis dan satu bersifat operasional. Adapun saran peneliti, yaitu kecamatan perlu meningkatkan ketegasan dan koordinasi serta mengusulkan pembuatan perbup teknis pembinaan.

**Kata kunci:** implementasi kebijakan, keuangan, desa

## PENDAHULUAN

Peraturan Bupati Merangin No. 18 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati kepada Camat Dalam Kabupaten Merangin. Salah satu kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada camat, yaitu dalam membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau kelurahan, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) huruf a No. 25 menyebutkan bahwa Camat membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan. Berdasarkan pada huruf a di atas bahwa camat diberikan kewenangan untuk

melakukan pembinaan administrasi pemerintahan desa.

Administrasi Pemerintahan Desa merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mencapai pembangunan yang berkualitas. Akan tetapi desa-desa di Kecamatan Batangmasumai dapat dikatakan administrasinya belum tertib, bahkan dapat menghambat pencairan dana desa.

Hasil wawancara Camat Batangmasumai, Jaya Kusuma menyampaikan bahwa:

Terkait temuan administrasi keuangan desa di Kecamatan Batangmasumai setiap tahunnya ada terus, tapi untuk data temuannya tidak bias berikan karena bersifat rahasia, takutnya nanti

beredar kemana-mana apalagi ke media 'kan kasian desanya, terkait adminitrasi itu pembinaannya oleh kami pihak kecamatan, kami terus berupaya agar tidak adanya lagi temuan adminitrasi keuangan desa oleh inspektorat.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pembinaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Batangmasumai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. peneliti melakukan pembatasan masalah yang dilakukan penelitian, yaitu peneliti memfokuskan penelitian pada implementasi kebijakan pembinaan administrasi keuangan pemerintahan Desa Plangki, Desa Lubukgaung, dan Desa Nibung.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pembinaan administrasi keuangan pemerintahan desa di Kecamatan

Batangmasumai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi?

2. Apa saja faktor internal dan faktor eksternal implementasi kebijakan pembinaan administrasi keuangan pemerintahan desa di Kecamatan Batangmasumai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi?
3. Bagaimanakah strategi implementasi kebijakan pembinaan administrasi keuangan pemerintahan desa di Kecamatan Batangmasumai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pembinaan administrasi keuangan pemerintahan Desa di Kecamatan Batangmasumai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
2. Untuk menganalisis faktor internal dan eksternal implementasi kebijakan pembinaan administrasi keuangan

**Tabel 1** Keterlambatan penyampaian dokumen APBDes 2019 di wilayah Kecamatan Batangmasumai Kabupaten Merangin

No	Nama Desa	Waktu Penyampaian Tahun 2019	Waktu Penyampaian Tahun 2019	Waktu Penyampaian Tahun 2020	Ideal Berdasarkan Permendagri APB-Des ditetapkan
1.	Salambuku	23 Mei 2018	2 April 2019	7 April 2020	31 Desember 2019
2.	Titianteras	3 Mei 2018	4 April 2019	6 April 2020	31 Desember 2019
3.	Nibung	17 Mei 2018	7 Mei 2019	8 April 2020	31 Desember 2019
4.	Lubukgaung	11 Mei 2018	6 Mei 2019	8 April 2020	31 Desember 2019
5.	Kederasan Panjang	3 Mei 2018	30 April 2019	14 April 2020	31 Desember 2019
6.	Pulaubaru	3 Mei 2018	5 April 2019	14 April 2020	31 Desember 2019
7.	Pulaulayang	30 April 2018	25 April 2019	22 April 2020	31 Desember 2019
	Rantaualai	30 April 2018	3 Mei 2019	2 April 2020	31 Desember 2019
8.					
9.	Tambangbesi	17 Mei 2018	6 Mei 2019	29 April 2020	31 Desember 2019
10.	Plangki	2 Mei 2018	22 April 2019	2 April 2020	31 Desember 2019

**Sumber:** DPMD Kabupaten Merangin

pemerintahan desa di Kecamatan Batangmasumai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi?

3. Untuk merumuskan strategi implementasi kebijakan pembinaan administrasi keuangan pemerintahan desa di Kecamatan Batangmasumai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

## KAJIAN PUSTAKA

Menurut Wilson dalam Solichin (2016:12) mendefinisikan kebijakan publik adalah *the actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matter, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)*" (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

George C. Edward III (1980: 10-12) mengatakan terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Suryaningrat dalam (Husin 2003: 10) mendefinisikan tentang pemerintah, yaitu :*" Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan."*

Menurut Talizidhu Ndaraha dalam (Tjahya 2010: 7) desa memiliki daerah otonom desa yang berbeda dengan otonomi daerah. Otonomi desa yang dimaksud mempunyai karakteristik: sejak dulu, berdasarkan hukum adat, tumbuh dalam masyarakat, isinya tidak terbatas, bersifat

elastis, secara tradisional dan lebih bersifat nyata dan materill"

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling dalam menentukan informan yang terdiri dari camat, sekretaris camat, kasi dan kepala Desa. penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data, pengumpulan data, penyajian data dan verifikasi data atau Simpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pembinaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Batangmasumai Kabupaten Merangin

### Komunikasi

#### a. Tranmisi

Penyaluran pembinaan administrasi keuangan pemerintah desa oleh Kecamatan Batangmasumai sudah dilakukan melalui pihak kecamatan dengan mengundang pemerintah desa, namun pihak kecamatan masih terkendala dalam melaksanakan penyaluran pembinaan ke desa-desa, yaitu kesiapan atau rendahnya kehadiran perangkat desa di kantor yang membuat pembinaan tidak maksimal dilakukan.

#### b. Kejelasan

Kejelasan komunikasi yang diberikan cukup jelas, namun keterbatasan pemerintah desa dalam memahami banyaknya peraturan teknis dan seringnya berubah-ubah peraturan teknis membuat pemerintah desa kerepotan dalam memahaminya.

#### c. Konsistensi

Konsistensi komunikasi telah konsisten hal tersebut ditandai dengan adanya

pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan. namun masih terkendala dengan kurangnya kehadiran perangkat desa dalam pembinaan tersebut.

Berdasarkan tiga indikator komunikasi dalam implementasi kebijakan pembinaan administrasi pemerintah desa di Kecamatan Batangmasumai, yaitu tranmisi, kejelasan, dan konsistensi telah dilaksanakan namun masih kurang optimal dilaksanakan karena rendahnya tingkat kehadiran perangkat desa, sehingga materi-materi pembinaan tidak dapat dipahami oleh semua perangkat desa di Kecamatan Batangmasumai.

### Sumber Daya

#### a. Staf

Staf dalam pembinaan administrasi keuangan pemerintah desa di Kecamatan Batangmasumai sangatlah kurang, ada saat ini hanyalah satu orang staf honorer. Hal ini tentunya membut Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat berat melaksanakan pembinaan administrasi desa sendiri, mengingat banyaknya jumlah desa yang ada diKecamatan Batangmasumai dan luasnya wilayah Batangmasumai tentunya menghambat efektivitas waktu dalam bekerja dan dapat menghambat pembinaan administrasi keuangan pemerintah desa ketika Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sakit atau dinas luar, tentunya pembinaan terhadap administrasi keuangan desa baik pembinaan secara langsung datang ke desa maupun pihak desa yang datang langsung ke kantor kecamatan.

#### b. Informasi

informasi-informasi yang diberikan dalam pembinaan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan perintah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal.

#### c. Wewenang

Kecamatan Batangmasumai memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan administrasi pemerintahan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Merangin No. 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati ke Camat, Salah satu kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat, yaitu dalam membina administrasi pemerintahan Desa.

#### d. Fasilitas

bahwa fasilitas dalam pembinaan administrasi pemerintah desa mencukupi untuk digunakan oleh aparat kecamatan, hal tersebut terlihat dari adanya fasilitas yang dibutuhkan seperti aula, kompter/laptop dan infocus dengan kondisi yang baik.

Berdasarkan hasil analisis di atas bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan administrasi keuangan desa diukur dengan empat indikator, yaitu staf, wewenang, informasi dan fasilitas terlihat bahwa staf pembinaan masih kurang atau hanya ada satu orang itupun honorer, pada indikator wewenang berdasarkan Perbup No. 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati ke Camat. Pada indikator informasi dan fasilitas pembinaan sudah mencukupi baik fasilitas kecil hingga fasilitas besar seperti gedung aula kantor camat dan fasilitas pembinaan lainnya.

### Disposisi

#### a. Pengangkatan Birokrat

bahwa pada indikator pengangkatan birokrat belum dilakukan oleh pihak kecamatan sebagaimana tidak ada dalam peta jabatan, bukan hanya tidak ada pada peta jabatan, sebagaimana pada

indikator staf tadi juga menunjukkan kekurangan staf.

b. Insentif

bahwa insentif pembinaan administrasi desa di Kecamatan Batangmasumai itu ada namun hanya untuk PNS saja, untuk pegawai honorer tidak mendapat insentif atau TPP, pegawai honorer hanya mendapatkan biaya sppd saja itupun dinilai kurang.

Berdasarkan hasil analisis di atas bahwa dimensi Disposisi terdiri dari dua indikator, yaitu pengangkatan birokrat dan insentif, pada indikator disposisi terlihat belum optimal karena pada indikator pengangkatan birokrat belum dilakukan oleh pihak kecamatan sebagaimana tidak ada dalam peta jabatan, bukan hanya tidak ada pada peta jabatan, sebagaimana pada indikator staf tadi juga menunjukkan kekurangan staf.

Kemudian pada indikator insentif pembinaan administrasi desa di Kecamatan Batangmasumai itu ada namun hanya untuk PNS saja, untuk pegawai honorer tidak mendapat insentif atau TPP, pegawai honorer hanya mendapatkan biaya sppd saja itupun dinilai kurang.

### **Struktur Organisasi**

a. Standar Operasional Prosedur

Peneliti melakukan observasi di kantor camat terkait SOP, peneliti tidak melihat adanya SOP pembinaan administrasi pemerintahan desa di kantor camat. Peneliti juga mencari peraturan bupati tentang pedoman teknis pembinaan administrasi, peneliti juga tidak menemukan adanya dokumen tersebut.

b. Fragmentasi

bahwa fragmentasi dalam implementasi kebijakan tidak ada karena tidak disediakan jabatan staf terkait pembinaan administrasi pemerintahan desa, di samping itu juga sangat kekurangan staf dalam membagi tugasnya.

Berdasarkan analisis di atas bahwa dimensi struktur organisasi belum optimal dilihat dari dua indikator struktur organisasi, yaitu indikator standar operasional prosedur (SOP) dan Fragmentasi. pada indikator standar operasional prosedur pembinaan administrasi keuangan pemerintah desa di Kecamatan Batangmasumai belum ada. Kemudian pada indikator fragmentasi atau pembagian tugas secara rinci juga belum ada bahkan nama jabatan yang terkait pembinaan pemerintah desa pada peta jabatan tidak ada.

Faktor-Faktor Internal Strategis dan Eksternal Strategis dalam Implementasi Kebijakan Pembinaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa oleh Pemerintah daerah di wilayah Kecamatan Batangmasumai adalah sebagai berikut.

### **Faktor Internal**

#### **Kekuatan**

1. Adanya peraturan perundang-undangan terkait pemerintah desa
2. Adanya kewenangan pemerintah daerah
3. Adanya kegiatan pembinaan administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Batangmasumai

#### **Kelemahan**

1. Kekurangan Pegawai
2. Belum adanya standar operasional prosedur (SOP)
3. Belum adanya peraturan bupati terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa

### **Faktor Eksternal**

#### **Peluang**

1. Adanya teknologi komunikasi dan informasi
2. Adanya pelatihan perangkat desa dan kepala desa oleh kementerian



3. Adanya pelatihan Perangkat desa dan kepala desa oleh pemerintah provinsi jambi

#### Ancaman

- Kepala desa dan aparat pemerintah desa yang tidak mau mengikuti pembinaan pemerintah daerah

Strategi implementasi kebijakan pembinaan administrasi keuangan pemerintah desa oleh pemerintah daerah di wilayah Kecamatan Batangmasumai adalah sebagai berikut.

#### Isu Sangat Strategis

1. Membuat aplikasi pembinaan administrasi keuangan pemerintahan desa
2. Meningkatkan jumlah pegawai pembinaan
3. Menyusun Peraturan Bupati Merangin terkait pembinaan
4. Menyusun SOP pembinaan

#### Isu Cukup Strategis

1. Mengikutsertakan pegawai kecamatan dalam pendampingan pelatihan
2. Meningkatkan pemanfaatan pelatihan yang diadakan oleh kementerian dan pemerintah provinsi

#### Isu Bersifat Operasional

1. Meningkatkan proaktif dalam memberikan teguran kepada pemerintah desa yang tidak mau mengikuti pembinaan yang berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan arah pembangunan yang baik

### SIMPULAN DAN SARAN

#### Simpulan

1. Implementasi kebijakan pembinaan administrasi keuangan pemerintahan desa di Kecamatan Batangmasumai

belum optimal dilihat dari empat dimensi teori implementasi kebijakan menurut Edward III. Dari empat dimensi tersebut pada dimensi komunikasi telah dilakukan dengan transmisi, kejelasan dan konsistensi namun rendahnya kehadiran perangkat desa dalam pembinaan.

kemudian pada dimensi sumber daya pada staf masih kekurangan dan faktor informasi, wewenang dan fasilitas telah mencukupi.

kemudian pada dimensi disposisi belum optimal karena tidak adanya pengangkatan birokrat terkait pembinaan bahkan tidak ada pada peta jabatan dan masih belum optimalnya insentif

Kemudian pada dimensi struktur organisasi juga belum optimal karena tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi.

2. Terdapat enam faktor internal dan empat faktor eksternal dalam implementasi kebijakan pembinaan administrasi keuangan pemerintahan desa di Kecamatan Batangmasumai
3. Strategi Implementasi Kebijakan Pembinaan Administrasi Keuangan Pemerintahan Desa di Kecamatan Batangmasumai, yaitu empat sangat strategis, satu cukup strategis dan satu bersifat operasional

#### Saran

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

- a. Perlunya Kecamatan Batangmasumai untuk dapat meningkatkan ketegasan dan teguran terhadap rendahnya ketidakhadiran aparat desa dalam pembinaan dan meningkatkan jumlah staf, berkoordinasi dalam pembuatan perbup dan SOP dengan dinas terkait serta mengevaluasi peta jabatan

- b. Perlunya Kecamatan Batangmasumai untuk dapat memanfaatkan faktor internal kekuatan dan melengkapi kelemahan untuk dipenuhi serta faktor internal meningkatkan agresifitas menggunakan peluang
- c. Perlunya Kecamatan Batangmasumai untuk memaksimalkan penggunaan strategi yang diusulkan dalam penelitian ini dengan terencana, sistematis dan konsisten.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo.2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Cetakan kedua. Bandung. Alfabeta.
- Adisasmita, Raharjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Cetakan pertama. Yogyakarta.Graha Ilmu.
- Anderson James E. 2003. Public Policymaking Fifth Edition. Houghton Mifflin Company. Boston New York
- Anggara Sahya. 2018. Kebijakan Publik. Cetakan ke I. Pustaka Setia. Bandung.
- Creswell Jhon W. 2018. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition. SAGE. London
- Edward George C. 1980. Implementating Public Policy. Congressinonal Quartterly Press. Washington DC
- Grindle Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton University Press, Princeton, New Jersey
- Hill Michael dan Hupe Peter L. 2002. Implementing Public Policy. SAGE. London
- Husin Salman Tandjung. 2003. Sistem Pemerintahan Desa. Alqaprint. Jatinangor
- Ilham dan Rikha, 2015. Pemodelan Kebijakan. Penulisan Literatur IPDN Tahun 2015
- Miles, Huberman dan Saldana. 1994. Qualitative data analysis: a methods sourcebook Third edition. SAGE. London
- Nazir, Moh.2017 Metode Penelitian.cetakan kesebelas. Ghalia Indonesia.
- Rangkuti Freddy.2017. Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating dan OCAI.cetakan keduapuluh tiga. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Satori, Djam'an dan komariah, Aan.2014.Metode Penelitian Kualitatif.ALFABETA.
- Sedrmayanti dan hidayat, syarifudin.2011. Metode Penelitian.cetakan ke dua. mandar maju Bandung
- Solichin Abdul Wahab, 2016. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke penyusunan model-model implementasi public.cetakan kelima. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Sugiyono.2012.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.cetakan ke tujuh belas.Alfabeta.Bandung.
- Sujarweni, Wiratna.2014. Metodologi Penelitian. cetakan pertama. Yogyakarta. Pustakabarupress.
- Supriatna Tjahya. 2010. Sistem Pemerintahan Desa. Cetakan pertama. Indra Prahasta. Bandung
- Syafiie, Inu kecana. 2017. Ilmu Pemerintahan. Bumi Aksara. Jakarta
- Tacjhan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Cetakan Ke 1. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi). Bandung
- Wasistiono Sadu. 2017. Perkembangan Ilmu Pemerintahan (Dari Klasik Sampai Kontemporer). Cetakan pertama. IPDN Press. Sumedang
- Yusuf, Muri 2016.Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Cetakan ke-3. Jakarta.Prenadamedia Group.

## Jurnal

- Agustinus Ghunu dkk. 2021. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. ISSN: 2541-2515(p), 2541-2035 (e) Volume: 6 (1) 2021
- Asmanang La Ode. Dkk. 2020. Pembinaan Administrasi Desa di Desa Wajajaya. Jurnal Pengabdian Vol 4, No, 1, Juli 2020 ISSN 2580 – 7978 (cetak) ISSN 2615 – 0794 (online)



- Aphum Humokor. Peran Pemerintah Kecamatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa di Kecamatan Bolangitang Kabupaten Bolaang Mongondow
- Bukhari. peran Camat Dalam Pembinaan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2014
- Indriyani Rita. 2020. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 9 No. 1
- Ismiyarto. 2019. Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Banjarnegara. Gema Publica Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik. I Vol 5, No. 2, Oktober 2019
- Kharisma Virgie Delawillia. Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa
- Mangimpis Adelfia Crestofiane. Implementasi Kebijakan Administrasi Desa dalam Pelayanan Publik diKecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan
- Prasetyo Yudhi. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di 10 Desa Wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi\_U) Kajian Multi Disiplin Ilmu Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat Isbn: 978-979-3649-81-8
- Puspasari. Oktaviani Rita. 2017. Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan. Jurnal Kajian Akuntansi, Vol 2, (2).
- Ridwan dkk. 2019. Efektifitas Implementasi Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sinjai. J. Paradigma, Vol.1(2):32-37.
- Rompas, Jufri Frani. 2020. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa.
- Wida Siti Ainul. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (2).
- Wijaya Raden, Rezky Aprilia. 2020. Implementasi kebijakan public dalam pengelolaan dana desa dikecamatan martapura kabupaten ogan komering ulu timur. Jurnal Kebijakan Pemerintahan 3 (2) (2020)
- Yanti Linda. 2020. Penerapan Prinsip-Prinsip Administrasi Keuangan Publik Dilihat Dari Aspek Transparansi di Kantor Desa Pudak Setegal Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. JAPB: Volume 3 No. 1
- Peraturan Peraturan
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Merangin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Dalam Kabupaten Merangin
- Sumber lainnya
- <http://kajanglako.com/id-8506-post-audit-dana-desa-inspektorat-merangin-temukan-banyak-kesalahan.html>. 25 Juni 2019 diakses pada hari senin 2 Desember Tahun 2019
- <https://titikjambi.com/berita-selengkapnya/jangan-main-main-dengan-dd-terbukti-di-merangin-dua-kades-yang-dipidanakan/5> November 2018 diakses pada hari senin 2 Desember Tahun 2019

<https://www.metrojambi.com/read/2020/02/19/51199/18-desadi-merangin-belum-serahkan-spj-dana-desatahun-2018>/diakses hari sabtu, 22 Februari 2020

Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 005/BPD/DPMD/2019 tanggal 12 Agustus 2019 perihal: Couching Klinik Penataan Administrasi Desa.

Laporan Tahun Kecamatan Batangmasumai Tahun 2019

Laporan Tahunan Kecamatan Batangmasumai Tahun 2020

Peta Jabatan Kecamatan Batangmasumai Kabupaten Merangin dalam Angka Tahun 2020

Surat Undangan Kecamatan Batangmasumai No. 141/17KCBM-05/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021